

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 7.660.000,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 24.160.000,00 . hal ini disebabkan karena Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoani sudah di limpahkan ke Propinsi, Sedang Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp 8.898.727.435,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.350.692.767,00 atau mencapai 95,17 %.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 9.253.736.242,93 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.842.806,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 9.186.385.636,93 berupa tanah sebesar Rp. 1.081.252.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.177.767.343,00, gedung dan bangunan sebesar Rp. 3.972.611.677,00, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 3.825.405.963,00,- dan Aset tetap Lainnya (netto) sebesar Rp. 17.979.525,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 64.507.800,-

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 12.138.014,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 26.692.399.023,93

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 7.660.000,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 8.567.393.360,00,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 8.559.733.360,00,-

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

- 2.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Beban
 - 3.1.3 Belanja
 - 3.1.4 Aset

3.1.5 Kewajiban

3.1.6 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada pemda

BAB IV Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemda

BAB V P E N U T U P

B A B II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERIKANAN

2.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Perikanan			
No.	Program dan Kegiatan	BELANJA		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	618.014.800,00	588.016.134,00	95,15
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
	b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	123.800.000,00	113.900.000,00	92,00
	c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74.826.000,00	74.805.000,00	99,97
	d. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kantor	15.725.000,00	15.696.150,00	99,82
	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.403.300,00	28.391.500,00	99,96
	f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.828.000,00	19.780.000,00	99,76
	g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,00	12.479.000,00	99,83
	h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.965.000,00	45.558.075,00	99,11
	i. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	14.680.000,00	11.150.000,00	75,95
	j. Penyediaan Makanan dan Minuman	30.187.500,00	30.030.000,00	99,48
	k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	130.600.000,00	114.806.409,00	87,91
	l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	70.500.000,00	70.420.000,00	99,89
2.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	347.139.000,00	342.416.531,00	98,64
	a. Pengadaan Meubiler	29.100.000,00	28.180.000,00	96,84
	b. Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	57.325.000,00	57.325.000,00	100,00
	c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	260.714.000,00	256.911.531,00	98,54
3	PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	117.106.800,00	91.354.300,00	78,01
	a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	46.012.500,00	44.571.100,00	96,87
	b. Penyusunan Perencanaan Anggaran	4.925.000,00	4.340.500,00	88,13
	c. Pengembangan dan Peningkatan Data Dan Informasi	66.169.300,00	42.442.700,00	64,14

4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	537.211.500,00	508.660.925,00	94,69
	a. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya	58.451.500,00	52.930.490,00	90,55
	b. Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Pancuran Boga	373.776.500,00	358.861.725,00	96,01
	c. Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	42.083.500,00	39.541.260,00	93,96
	d. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	19.054.000,00	16.087.600,00	84,43
	e. Pembinaan Kelompok Pembudi Daya Ikan (POKDAKAN)	43.846.000,00	41.239.850,00	94,06
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.580.840.405,00	4.356.287.105,00	95,10
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK)	1.887.381.000,00	1.744.306.500,00	92,42
	b. Operasional Balai Sekaya Maritim	29.157.785,00	23.406.850,00	80,28
	c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2.292.008.320,00	2.262.011.000,00	98,69
	d. Pro Gerakan Anti Kemiskinan (PRO-GAKIN)	44.382.500,00	31.227.075,00	70,36
	e. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	126.130.500,00	124.187.440,00	98,46
	f. Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan	37.747.500,00	26.629.000,00	70,55
	g. Pendampingan Asuransi Nelayan	43.668.000,00	38.723.500,00	88,68
	h. Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap	120.364.800,00	105.795.740,00	87,90
6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	97.807.000,00	96.790.000,00	98,96
	a. Peningkatan Produksi Ikan	97.807.000,00	96.790.000,00	98,96
7	PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	445.883.600,00	339.472.256,00	76,13
	a. Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)	154.819.000,00	77.214.669,00	49,87
	b. Promosi dan Publikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	85.854.200,00	83.864.487,00	97,68
	c. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	61.632.600,00	54.259.300,00	88,04
	d. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP	40.065.000,00	39.889.800,00	99,56
	e. Pembinaan Poklamsar Bidang P2HP	38.099.200,00	37.806.200,00	99,23
	f. Pelatihan Cara Pengolahan Yang Baik (GMP/SOP)	65.413.600,00	46.437.800,00	70,99
TOTAL		6.744.003.105	6.322.997.251	93,76

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal Pencapaian Target kinerja ini memiliki hambatan dan kendala-kendala, yang diuraikan per kegiatan dibawah ini :

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 7 Program dan 38 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.744.003.105,00 dan Realisasi sebesar Rp. 6.322.997.251,-

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 618.014.800,00,- dengan realisasi anggaran Rp . 588.016.134,00,- atau 95,15 %. Pada Program ini terdiri dari 12 Kegiatan Yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.51.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.000.000,- (100%) ,

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 123.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.900.000,- atau 92,00% ,

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 74.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.805.000,- (99,97%) ,

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 15.725.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.696.150,- (99,82%) ,

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 28.403.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.391.500,- (99,96%) ,
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 19.828.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.780.000,- (99,76%) ,
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 12.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.479.000,- (99,83%) ,
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yaitu 3 unit PC dan 1 unit AC, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.558.075,- (99,11 %) ,
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 14.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.150.000,- (75,95%) ,
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Makanan dan Minuman selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.187.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.030.000,- (99,48%) ,
- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.231.000,- (87,47%) ,
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah yang dihadiri selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.420.000,- (99,89%) ,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perikanan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran Program ini Rp. 347.139.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 342.416.531,00,- atau 98,64 %. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Meubiler

Sasaran Kegiatan ini adalah tersedianya meubiler yang mendukung sarana kerja aparatur Dinas Perikanan, berupa pengadaan meja kerja pejabat dan lemari arsip dengan rincian 2 Unit meja kerja dan 5 unit lemari arsip sehingga menambah nilai aset Dinas Perikanan.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 29.100.000,- dengan realisasi 28.180.000,- (96,84 %).

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan agar menambah nilai aset bangunan dan terpeliharanya gedung kantor Dinas Perikanan yaitu berupa rehab Kantor ,Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 57.325.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 57.325.000,- atau 100 %.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 260.714.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 256.911.531,- atau 98,54%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan agar tersedianya laporan kinerja, data statistik perikanan dan keuangan yang akurat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan pagu dari Program ini sebesar Rp. 117.106.800,- dimana realisasi anggaran Rp. 91.354.300,- atau 78, 01%. .

a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga kalau ada permasalahan dapat dicari solusinya, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 46.012.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 44.571.100,- atau 96,87%.

b. Penyusunan Perencanaan Anggaran

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya sistim pelaporan kinerja dan keuangan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 4.925.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.340.500,- atau 88,13%.

- c. serta Pengembangan dan Peningkatan data dan informasi.
Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya Data dan Informasi Dinas Perikanan Yang Valid dan Akurat, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 66.169.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.442.700,- atau 64,14%.

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan informasi pengelolaan potensi perikanan tangkap yang ada di Pesisir Selatan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas usaha perikanan tangkap serta kesejahteraan nelayan. Untuk mencapai tujuan program tersebut, program ini memiliki pagu anggaran Rp 4.580.840.405,- dengan realisasi Rp. 4.356.287.105,- atau 95,10 % dan didukung oleh beberapa kegiatan berikut ini:

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil Untuk Nelayan (DAK 2018)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.887.381.000,- dengan realisasi keuangan Rp 1.744.306.500,- atau 92,42%. sarana dan prasarana yang diberikan adalah :

- 1). Pengadaan Perahu Jukung sebanyak 36 unit
- 2) Pengadaan Mesin Tempel 5 PK sebanyak 36 unit
- 3) Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Gillnet Monofilament) sebanyak 360 piece .
- 4) Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan (Serok) sebanyak 36 Unit .

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bersumber dari Dana APBD tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.292.008.320,- dengan realisasi keuangan Rp 2.262.011.000,- atau 98,69%. sarana dan prasarana yang diberikan adalah :

1. Pengadaan Mesin Tempel 40 PK 19 unit
2. Pengadaan Mesin Tempel 15 PK sebanyak 23 unit
3. Pengadaan Mesin Long Tail 5 PK merk Robin sebanyak 49 Unit
4. Pengadaan Mesin 5 PK sebanyak 8 Unit
5. Pengadaan Mesin merk yamaha TF 155 sebanyak 1 unit
6. Pengadaan Mesin Long Tail MZ 200 sebanyak 26 Unit

- c. Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Pro-GAKIN) Kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir nelayan sehingga dengan memberdayakan para nelayan agar keluar dari anggapan bahwa nelayan itu identik dengan kemiskinan. Pro Gakin merupakan program penyuluhan guna membangun perekonomian nelayan .

Kegiatan ini bersumber dari Dana APBD dengan Anggaran sebesar Rp. 44.382.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.227.075,- atau 70,36 %.

d. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Pusat dan Propinsi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 126.130.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.187.440,- atau 98,46%.

e. Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pada masyarakat perikanan akan peluang-peluang modal usaha untuk menjalankan aktifitasnya para nelayan. Seperti Kredit Usaha Rakyat yang dapat diakses oleh para nelayan baik di BRI, BNI dan BPD. Dalam hal ini, para nelayan akan mendapat pendampingan dalam mengakses kredit tersebut oleh Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPB MU) yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan sesuai dengan aturan Bank masing-masing. Pada tahun 2018, hampir lebih kurang Rp.3.800.000.000 para pelaku usaha perikanan mendapatkan modal usaha melalui perbankan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.747.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.629.000,- atau 70,55 %.

f. Pendampingan Asuransi Nelayan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi program pusat Asuransi Nelayan. Program asuransi nelayan merupakan santunan bagi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan di Laut dengan kriteria :

1.	Kecelakaan Dilaut dan Meninggal Dunia	:	200.000.000,-
2.	Kecelakaan di Laut dan Cacat tetap	:	100.000.000,-
3.	Biaya Pengobatan bagi nelayan	:	20.000.000,-
4.	Kematian Alami	:	160.000.000,-

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.668.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.723.500,- atau 88,68 % .

g. Operasional Balai Sekaya Maritim

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengoperasian Balai Sekaya Maritim sehingga kegiatan berjalan lancar. Anggaran kegiatan sebesar Rp.29.157.785,- dan terealisasi sebesar Rp.23.406.850,- atau 80,28 %.

- h. Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap
- Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kelembagaan KUB yang berbadan hukum . Anggaran kegiatan sebesar Rp. 120.364.800,- dan terealisasi sebesar Rp.105.795.740,- atau 87,90 %.

5. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang di topang dengan menekan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 537.211.500,- dengan realisasi anggaran Rp.508.660.925,- atau 94,68% . yang terdiri dari 5 kegiatan diantaranya

- a. Operasional BBI Pincuran Boga
- Kegiatan ini bertujuan tersedia operasional BBI Pincuran Boga dan tersedianya benih di BBI Picuran Boga, Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp .373.776.500,- dengan realisasi keuangan Rp 358.861.725,- atau 96,01%
- b. Penanganan Hama dan Penyakit Ikan
- Kegiatan ini bertujuan untuk menangani hama penyakit ikan sehingga produksi ikan meningkat dengan cara memberi obat-obatan dan vitamin seperti Premix Aquavita , Anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 42.083.500,- dengan realisasi Rp. 39.541.260,- atau 93,96%.
- c. Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR)
- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap UPR, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.054.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 16.087.600,- atau 84,43%.
- d. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
- Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Budidaya yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 58.451.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 52.930.490,- atau 90,55%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Bantuan Pakan dan Benih (nila dan kerapu).
- e. Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)
- Kegiatan ini bertujuan terbinanya kelompok Pokdakan dan terpantaunya perkembangan usaha pokdakan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 43.846.000,- dengan realisasi Rp. 41.239.850,- atau 94,06%.

6. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk peningkatan produk perikanan yang berdaya saing dengan cara meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 445.883.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 339.472.256 atau 76,13 %. Program ini didukung dengan 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Promosi dan Publikasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Anggaran kegiatan ini Rp. 85.854.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 83.864.487,- atau 97,68 % , Kegiatan ini bertujuan Memfasilitas pengusaha bidang perikanan, khususnya pengolah ikan untuk membantu pemasaran produk hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha bidang perikanan juga merupakan sebagai media informasi dan interaksi bisnis antara pemilik dan pengguna teknologi bidang usaha perikanan serta terpacunya pemerintah propinsi, kabupaten kota, pelaku bisnis industri perikanan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama didalam pengembangan industri perikanan

b. Gemar Makan Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk gemar makan ikan, mengingat ikan memiliki komposisi nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan rata-rata konsumsi ikan. Ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari : pelaksanaan lomba masak serba ikan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan lomba masak serba ikan Tingkat Provinsi hingga nasional, pelaksanaan lomba inovasi tingkat provinsi dan nasional. Anggaran Kegiatan ini Rp. 154.819.000,- dan terealisasi Rp. 77.214.669,- atau 49,87 % .

c. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang P2HP

Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 40.065.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 39.889.800,- atau 99,56 % dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat.

d. Pembinaan Poklaksar Bidang P2HP

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap poklaksar dalam meningkatkan kelembagaan yang berbadan hukum (akte notaris) dan akses modal

dalam bentuk pinjaman lunak seperti KUR dan LPMUKP. Pagu Anggaran kegiatan sebesar Rp. 38.099.200,- dengan realisasi Rp. 37.806.200,00 atau 99,23 %.

e. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 61.632.600, terealisasi sebesar Rp.54.259.300,- atau 88,04 % .Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi penggunaan bahan berbahaya pada hasil perikanan, keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang produk hasil perikanan yang menggunakan bahan berbahaya, meningkatkan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah : pengambilan sampel yang dilakukan pada 15 kecamatan terhadap produk perikanan (ikan segar dan ikan olahan) dan pengujian kandungan formalin di Laboratorium.

f. Pelatihan Cara Pengolahan Yang Baik (GMP/SSOP)

Kegiatan ini bertujuan tersedianya produk olahan hasil perikanan yang aman dikonsumsi dan adanya pengolah hasil yang bersertifikat. Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 65.413.600,00 terealisasi sebesar Rp. 46.437.800,- atau 71,00 %.

BAB. III.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan Pemda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka mulai pada tahun 2018 ini, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 terdiri dari:

3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.1.2. Beban

Beban merupakan suatu **penurunan** nilai ekonomi yang berupa kas keluar atau aktiva berkurang. Biasanya beban dianggap sebagai **kewajiban** yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan **tujuan** untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Beban Perolehan Pendapatan
- b. Beban Operasi/rutin
- c. Beban operasional lainnya
- d. Beban lainnya

3.1.3. Belanja

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja

3.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Perikanan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perikanan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- e. Ekuitas Dana Lancar
- f. Ekuitas Dana Investasi
- g. Ekuitas Dana Cadangan

3.2 . Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

a. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran Rp.9.988.129.368,- dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	8.594.271.105,00	8.567.393.360,00
	Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2018 realisasi Belanja Operasi mencapai Rp. 8.567.393.360,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	2.107.887.259,00	1.757.920.934,00
	- Tambahan Penghasilan PNS	298.650.000,00	817.809.250,00
	- Insentif Pemungutan Ret Daerah	00,00	00,00
	Jumlah Belanja Pegawai	2.406.537.259,00	2.575.730.184,00

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Bahan Pakai Habis	209.295.076,00	166.522.365,00
- Belanja Bahan/Material	139.034.641,00	83.865.562,00
- Belanja Jasa Kantor	116.596.436,00	91.364.750,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	156.989.095,00	178.651.131,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	72.769.000,00	34.575.900,00
- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	10.250.000,00	47.450.000,00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	117.400.000,00	74.100.000,00
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.448.000,00	-
- Belanja Makanan dan Minuman	89.933.500,00	40.860.000,00
- Belanja Pakaian Kerja	18.275.000,00	13.752.500,-
- Belanja Perjalanan Dinas	1.023.806.115,00	699.724.418,00
- Belanja Pemeliharaan	126.415.400,00	71.851.150,00
- Belanja Jasa Konsultasi	-	37.850.000,00
- Belanja Hibah Barang/Belanja Barang untuk diserahkan kepada	3.118.383.650,00	3.984.045.400,00

masyarakat /pihak ketiga		
- Belanja Honorarium Non Pegawai	31.550.000,00	19.150.000,00
- Honorarium PNS	169.600.000,00	196.000.000,00
- Honorarium Non PNS	225.850.000,00	250.700.000,00
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	1.200.000,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	6.187.733.846,00	5.991.663.176,00

Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Alat dan Mesin	-	129.437.700,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	123.286.812,00	23.994.800,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	29.822.726,00	-
- Belanja Modal Pengadaan Alat bengkel bermesin	-	1.469.000,00
- Belanja Modal Pengadaan alat rumah tangga	21.147.500,00	31.608.900,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.491.500,00	25.815.000,00
- Belanja Modal Pengadaan meja & kursi kerja/Rapat Pejabat	16.139.000,00	28.180.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	17.085.375,00	-
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	259.578.020,00	194.452.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	7.444.375,00
Jumlah Modal	484.547.933,00	331.334.075,00

b. Aset

Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.842.806,-
	Saldo kas Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 2.842.806,- hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam menghitung sisa UYHD dan ada SPJ yang belum di entri karena diakhir tahun banyak SPJ yang bertumpuk sehingga ada spj yang tercecce, tapi dana yang di kas sudah disetorkan sebagai tambahan sisa UYHD pada tanggal 07 Januari 2019 , saldo tersebut terletak pada :		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	2.842.806,-
	Jumlah	-	2.842.806,-

Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)
1.	Aset Tetap	8.855.051.561,93	9.186.385.636,93
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 8.855.051.561,93 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 9.186.385.636,93 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Tanah	1.081.252.000,00	1.081.252.000,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 1.081.252.000,00 tidak ada terjadi mutasi tambah.		
	2. Peralatan Dan Mesin	10.048.329.643,00	10.185.211.718,00
	Dalam tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 136.882.075,00		
	3. Gedung dan bangunan	3.778.159.677,00	3.972.611.677,00
	Dalam tahun 2018 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 194.452.000,00		
	4. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.825.405.963,00	3.825.405.963,00
	Dalam tahun 2018 tidak terjadi mutasi tambah		
	5. Aset Tetap Lainnya	10.535.150,00	10.535.150,00
	Dalam tahun 2018 tidak terjadi mutasi tambah		
	6. Akumulasi Penyusutan	10.091.714.499,07	0
	Dalam tahun 2018 tidak terjadi mutasi Kurang sebesar Rp. 10.091.714.499,07		
2.	Aset Lainnya	64.507.800,-	0
	Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 64.507.800,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 , hal ini terjadi karenapada tahun 2018 terjadi pengurangan (mutasi kurang) yang terletak pada Aset tidak berwujud (sofwer)		
c	Kewajiban		
	Komposisi dan nilai saldo Kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 12.138.014,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0 , hal ini terjadi karen apada tahun 2018 terjadi pengurangan (mutasi kurang) yang terletak pada Utang Jangka Pendek lainnya		
d	Ekuitas		
	Komposisi dan nilai saldo Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 29.090.850.346,07,- dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 19.280.942.942,00 , hal ini terjadi karen apada tahun 2018 terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp. 334.176.681,- dan mutasi kurang sebesar Rp. 10.144.084.285,07		

BAB VI

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan, Januari 2019

**Ph KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. ARLINDAWATI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19661028 199210 2 001